



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 27 April 2017

Halaman: 2

DPRD Gagas Raperda Bantuan Hukum Warga Miskin

YOGYA (MERAPI) - DPRD Kota Yogyakarta menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk mengatur pemberian bantuan hukum bagi warga miskin dan rentan miskin apabila menghadapi masalah hukum di pengadilan. "Selama ini, masih banyak warga miskin yang kesulitan mengakses bantuan hukum dan hal itu menjadi keprihatinan kami. Oleh karena itu, kami pun berusaha menyiapkan aturan terkait pemberian bantuan hukum untuk mereka," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti, Rabu (26/4).

Menurut dia, rancangan peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan tahun ini sehingga aturan itu bisa segera digunakan oleh masyarakat miskin yang membutuhkan. Melalui aturan tersebut, lanjut Bambang, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengalokasikan dana bantuan hukum bagi warga yang membutuhkan. "Di pengadilan sebenarnya ada alokasi anggaran untuk mengakses bantuan hukum meskipun saya tidak tahu berapa jumlahnya. Hanya saja, banyak warga yang belum mengaksesnya," katanya seperti dilansir *Antara*.

Selama ini, belum banyak warga miskin yang berperkara di pengadilan mengakses bantuan hukum karena berbagai sebab di antaranya, belum memahami proses hukum dan mengalami kesulitan keuangan. "Hal ini harus menjadi pencermatan dari pemerintah untuk membantu warga mengakses bantuan hukum," ujarnya.

Bambang memastikan bantuan hukum yang diberikan kepada warga oleh pemerintah tidak akan tumpang tindih dengan bantuan yang ada di pengadilan karena ada batasan-batasan yang diterapkan untuk mengaksesnya.

(*)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005